

RANCANGAN MODEL
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN
BERBASIS AGRIBISNIS DI DAERAH RIAU¹
(Modeling of Economic Empowerment of Rural Community Based on
Agro-Business Activities in Riau)

Almasdi Syahza²
Pusat Pengkajian Koperasi dan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PPKPEM) Universitas Riau

Email: asyahza@yahoo.co.id; syahza@telkom.net
Website: www.almasdi.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Pelaksanaan pembangunan pertanian di pedesaan harus dirancang dengan sistem agribisnis yang melibatkan berbagai lembaga ekonomi dan penunjang, antara lain; perguruan tinggi, lembaga perkreditan, pengusaha, pengusaha tani (petani), dan koperasi. Koperasi merupakan motor penggerak pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh sistem agribisnis. Koperasi agribisnis dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi pedesaan sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.

Kata kunci: Pemberdayaan, ekonomi pedesaan, agribisnis

Abstract

The objective of study was to identify support factors of rural economic development. The study showed that agricultural development in rural areas should be designed using agro-business system that involved several economic institutions and their supports, such as: Universities, Micro-financing, entrepreneurs, farmer, Public Cooperation. Public Cooperation is an engine growth of economic empowerment of rural community. The function of the Cooperation is a business unit that carry out agro-business activities. The Cooperation would create employment, generate society income and increase social welfare, especially for the rural society.

Key words: Empowerment, Rural Economic, Agro-business

¹ Telah dipublikasikan dalam *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Volume 3 Nomor 2 November 2003, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

² Kepala Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PPKPEM) Universitas Riau; Staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggembirakan. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan sasaran pembangunan Daerah Riau harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan akan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin; dan pengusaha industri kecil (Pemda Riau dalam Almasdi Syahza, 2001a).

Setiap pembangunan di daerah tidak terlepas dari kelima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) tanaman perkebunan; 3) usaha perikanan; 4) usaha peternakan; 5) usaha pertambangan; 6) sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan (Almasdi Syahza, 2003b).

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah (Bustanul Arifin, 2001).

Faktor lain yang mendukung prospek pengembangan agribisnis di Daerah Riau untuk masa datang, antara lain: 1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi

suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat (Almasdi Syahza, 2002a).

Menurut Bungaran Saragih (2001a), sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian (Bungaran Saragih, 2001b). Organisasi bisnis di pedesaan ini berfungsi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey. Lokasi penelitian di Kabupaten Pelalawan (10 kecamatan) dan Kabupaten Karimun (3 kecamatan). Pada setiap kecamatan di pilih daerah potensial untuk

pengembangan komoditi agribisnis dengan kriteria sebagai berikut: 1) daerah yang terpilih sebagai sampel merupakan daerah yang potensial menghasilkan komoditi unggulan pada setiap kecamatan; 2) petani sampel adalah petani di daerah yang hidupnya tergantung pada hasil pertanian. Waktu penelitian selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Juni sampai Oktober 2001.

Informasi pada penelitian ini banyak menggunakan data primer, antara lain: 1) data dari birokrasi pedesaan dan pemuka masyarakat berupa potensi sumberdaya yang ada, bentuk perekonomian masyarakat, komoditas unggulan dan penunjang di pedesaan, kebiasaan masyarakat dalam berusahatani, diversifikasi usahatani, dan pemilikan faktor produksi oleh masyarakat; 2) data dari masyarakat berupa kegiatan usahatani, pola usahatani dan penggunaan faktor produksi pertanian, produksi, harga jual, rantai pemasaran, status pemilikan dan penguasaan lahan, kontribusi pendapatan, dan tingkat kemampuan petani serta masalah-masalah yang dihadapi oleh petani; dan 3) lembaga tataniaga yang berhubungan secara langsung dengan ekonomi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terutama terhadap data kualitatif. Hasil analisis kualitatif akan menemukan bentuk model pemberdayaan ekonomi pedesaan berbasis agribisnis.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Masih terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar daerah ini paling menyolok adalah antara daerah pengembangan kawasan industri dengan kawasan pengembangan pertanian. Daerah pengembangan pertanian tersebut mata pencarian pokok masyarakatnya hanya bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari kayu, nelayan, dan petani tradisional (subsisten).

Kesenjangan ini akan diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan nonpetanian (basis ekonomi perkotaan). Kesenjangan ini akan berakibat pada tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antar kota dan pedesaan akan semakin parah, sehingga daerah-daerah tertinggal akan semakin banyak ditemui. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial (Almasdi Syahza, 2002b).

Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat, tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan daerah tertinggal akan semakin tertinggal sementara yang maju akan tetap semakin maju dengan percepatan yang semakin tinggi dan sulit dikejar. Penyebabnya adalah perbedaan sumberdaya manusia (SDM), pertumbuhan awal dan hasil pembangunan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya, sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui campur tangan pemerintah dengan cara mengkatrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing dengan daerah lain.

Secara teoritis meningkatnya kesenjangan antar daerah atau antar masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kurangnya pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Kekurangan tersebut akan menyebabkan rendahnya kemampuan berproduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga (Almasdi Syahza, 2003c).

Untuk mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin (petani), antara lain: dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit untuk membantu permodalan usaha pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini dilakukan harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan manajemen produksi. Untuk keberhasilan program ini adalah penting bahwa program bimbingan dan pelatihan ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk beberapa periode dan dievaluasi.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda saat ini telah menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan pertanian dan industri yang berbasis sumberdaya alam serta

sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2003a).

Dalam mengatasi krisis ekonomi sekarang kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep agribisnis.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya. Gambaran keadaan penduduk dan mata pencaharian utama yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan di dua kabupaten adalah sebagai berikut:

Kabupaten Karimun

Pengembangan agribisnis untuk daerah Kabupaten Karimun juga ditunjang dengan banyaknya keluarga tani di daerah. Dari data yang diperoleh terdapat jumlah keluarga tani yang hidupnya tergantung pada sektor pertanian sebanyak 14.336 KK atau sebesar 35,40 persen (Tabel 2). Keluarga tani yang terbanyak penyebarannya di Kecamatan Kundur yaitu sebanyak 8.932 KK atau

65,31 persen dari jumlah KK yang ada di Kecamatan Kundur. Angka ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kundur mata pecaharian pokok masyarakat dari sektor pertanian. Apakah dia sebagai petani yang terlibat langsung dalam kegiatan pertanian atau sebagai tenaga kerja di sektor pertanian. Kegiatan pertanian yang diusahakan oleh keluarga tani tersebut dalam bentuk kegiatan tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan (Almasdi Syahza, 2001b).

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Keluarga Tani di Kabupaten Karimun

Kecamatan	Penduduk	Kepala Keluarga		Jumlah KK
		KK Petani	KK Nonpetani	
1. Karimun	98.780	4.924 (22,93)	16.549 (77,07)	21.473
2. Kundur	63.218	8.932 (65,31)	4.745 (34,69)	13.677
3. Moro	24.576	480 (8,99)	4.862 (91,01)	5.342
Jumlah	186.574	14.336 (35,40)	26.156 (64,60)	40.492

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Karimun Tahun 2001

Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah KK di Kecamatan

Pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis di daerah Kabupaten karimun akan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan keluarga petani. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah yang cocok untuk pengembangan pertanian, begitu juga daerah pemasarannya sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pusat pertumbuhan ekonomi Batam.

Kabupaten Pelalawan

Sumber penghasilan penduduk Kabupaten Pelalawan pada umumnya adalah pertanian, yaitu dari sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. Kegiatan usaha lain berupa sambilan yaitu mencari kayu ke hutan. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa hampir 80 persen adalah rumah tangga petani di Kabupeten Pelalawan. Pertanian merupakan mata pencarian pokok masyarakat karena daerah ini memang sesuai untuk kegiatan pertanian terutama perkebunan kelapa sawit. Dari sektor perkebunan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan petani, karena dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan keluarga. Namun sebagian masyarakat yang tidak

terlibat dalam kegiatan perkebunan kehidupannya sangat memprihatinkan, karena keterbatasan sumberdaya yang mereka miliki, antara lain: modal, tingkat pendidikan, dan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pemasaran produk pertanian. Dari sisi lain juga masih banyaknya daerah terisolir dan terbatasnya sarana transportasi. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat petani untuk memasarkan produk mereka ke luar daerah (*Almasdi Syahza, 2001c*).

Guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan tersebut, maka perlu ditemukan suatu alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani pedesaan. Dengan cara ini akan dapat membuka daerah pemasaran produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Tabel 2 Jumlah Rumah Tangga dan Rumah-tangga Petani Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2000

Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah Rumah Tangga Petani	
	Jiwa	Rmh.Tangga	Rmh.Tangga	Persentase*
1. Langgam	12.978	2.009 (4,27)	1.266	63.02
2. Pangkalan Kerinci	36.679	3.728 (4,14)	902	24.20
3. U K U I	34.087	4.435 (3,96)	3.737	84.26
4. Pangkalan Lesung	14.789	3.162 (4,15)	2.918	92.28
5. Pangkalan Kuras	25.180	5.164 (3,98)	4.139	80.15
6. Bunut	16.284	3.256 (3,56)	2.710	83.23
7. Pelalawan	11.030	1.846 (3,83)	1.723	93.34
8. Kerumutan	15.463	2.940 (4,59)	2.932	99.73
9. Teluk Meranti	20.629	1.588 (5,21)	1.507	94.90
10. Kuala Kampar	26.262	4.447 (4,82)	4.133	92.94
JUMLAH	213.381	32.575 (4,21)	25.967	79.71

Sumber: Pelalawan Dalam Angka Tahun 2001

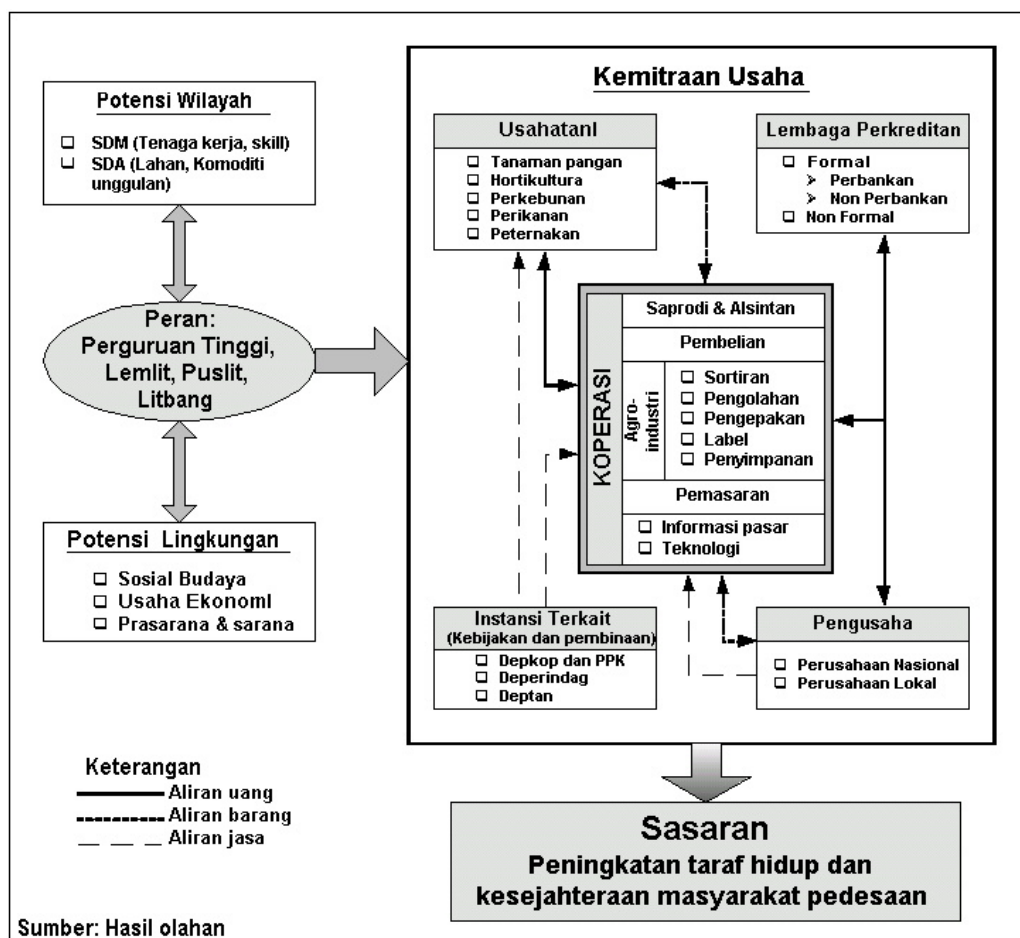
* Menyatakan persentase terhadap rumah tangga kecamatan
Angka dalam kurung merupakan rata-rata anggota keluarga.

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis

Sistem Agribisnis adalah semua aktifitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang

dihasilkan usahatani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Agribisnis sebagai suatu sistem meliputi; 1) subsistem pengadaan sarana produksi; 2) subsistem produksi; 3) subsistem pengolahan hasil; 4) subsistem pemasaran; dan 5) subsistem kelembagaan. Agar semua subsistem itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan agribisnis, maka perlu dirancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berdasarkan agribisnis dengan melibatkan beberapa lembaga yang mendukung.

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis agribisnis, antara lain: 1) peran perguruan tinggi; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) pengusaha tani (petani); 5) instansi terkait; dan 6) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung ekonomi pedesaan tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis

Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi (PT) melalui lembaga penelitian, atau pusat penelitian sangat memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Peran PT ini memiliki tiga dimensi kekuatan. Dimensi pertama PT harus dapat menggali potensi wilayah sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan serta komoditi unggulan daerah. Dimensi kedua mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana. Dimensi ketiga merupakan perumusan rekomendasi dari perpaduan dimensi pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis. Di samping itu sebagai lembaga indenpenden, PT merupakan lembaga pemantau kegiatan agribisnis di pedesaan.

Pada kelompok mitra usaha agribisnis terlibat lima kelompok pelaku agribisnis, yaitu; lembaga ekonomi pedesaan (koperasi), pengusaha tani (petani), lembaga perkreditan, pengusaha, dan instansi pemerintah. Kelima kelompok mitra usaha ini harus merupakan satu kesatuan yang saling berkait dalam kegiatan agribisnis.

Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat/mesin pertanian, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan agribisnis di pedesaan. Fungsinya sebagai pedagang adalah penyalur produk pertanian yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, swalayan, restoran, hotel, atau pasar tradisional. Dari sisi lain pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.

Lembaga Perkreditan

Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis cukup pegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan agribisnis ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

Pengusaha tani (petani)

Kurang berkembangnya kegiatan pertanian yang berbasiskan agribisnis di pedesaan disebabkan karena beberapa hal, antara lain: tingkat pengetahuan petani, pemilikan modal, tidak adanya kepastian pasar, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi semuanya ini harus melalui suatu organisasi yang mempunyai misi sama. Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah satu jaminan pasar produk pertanian di pedesaan. Oleh karena itu petani harus mengutamakan produksi komoditi unggulan di daerahnya. Petani melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi sebagai penyedia dana. Petani melakukan kegiatan usahataniya didampingi oleh tim ahli yang ditunjuk oleh koperasi. Dengan demikian terjadi hubungan yang erat antara koperasi dan petani. Bentuk mitra usaha ini akan memberikan beberapa keuntungan kepada petani, antara lain; 1) adanya jaminan pasar produk pertanian bagi petani; 2) petani terhindar dari resiko fluktuasi harga; 3) petani mendapat tiga keuntungan, yaitu keuntungan dari hasil penjualan produk pertanian, keuntungan dari pembagian sisa usaha oleh koperasi pada akhir tahun, dan keuntungan dari investasi yang ditanamkan pada koperasi (paket agroestat); dan 4) terjalinnya hubungan kemitraan usaha antara koperasi dan petani.

Instansi terkait

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasikan agribisnis diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku agribisnis. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan petani. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.

Koperasi sebagai badan usaha

Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar (*Bungaran Saragih, 2001b*).

Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat/mesin pertanian kepada anggota (petani). Dari sisi lain koperasi juga sebagai pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi juga berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Pada koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahatani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakekatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolah produk pertanian (agroindustri), mesin dan alat pertanian harus berupa

penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi. Dengan demikian konsep agroestat di pedesaan dapat berkembang (Almasdi Syahza, 2002a).

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

Koperasi sebagai unit usaha dibidang agribisnis, secara umum mencakup bidang-bidang usaha yang sangat luas yang pada prinsipnya dapat dikelompokkan kepada lima komponen utama, yaitu; 1) bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa alat-alat dan mesin-mesin pertanian; 2) bidang usaha dalam produksi komoditas pertanian; 3) bidang usaha industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri); 4) bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian; dan 5) bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi, atau penyimpanan (Almasdi Syahza, 2003b).

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan masyarakat, pada hakekatnya agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

KESIMPULAN

1. Pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya merupakan kebijakan yang strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk itu diperlukan faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan terutama yang berbasis agribisnis, antara lain: 1) peran perguruan tinggi; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) pengusaha tani (petani); 5) instansi terkait; dan 6) koperasi sebagai badan usaha.

2. Perguruan tinggi memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, peran tersebut antara lain: 1) dapat menggali potensi wilayah sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan serta komoditi unggulan daerah; 2) mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana; 3) memberikan rekomendasi dari hasil perpaduan peran pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis.
3. Koperasi merupakan motor penggerak pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis.

REKOMENDASI

1. Agar semua subsistem agribisnis itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan agribisnis, maka perlu dirancang model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis agribisnis dengan melibatkan beberapa lembaga pendukung dalam bentuk kelompok mitra usaha agribisnis, yaitu: lembaga ekonomi pedesaan (koperasi), pengusaha tani (petani), lembaga perkreditan, pengusaha, dan instansi pemerintah.
2. Investasi yang dilakukan oleh koperasi pada kegiatan agribisnis harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Karena itu setiap anggota harus mempunyai saham kepemilikan aset koperasi agribisnis. Dengan demikian konsep agroestat di pedesaan dapat berkembang.

BAHAN RUJUKAN

Almasdi Syahza, 2001a. *Studi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Propinsi Riau*, PPKPEM Unri, Pekanbaru.

-----, 2001b. *Penelitian dan Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Karimun*, BAPPEDA Kabupaten Karimun, Pekanbaru.

-----, 2001c. *Studi Sosial Ekonomi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pelalawan*, BAPPEDA Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru.

- , 2002a. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- , 2002b. Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bengkalis Riau, dalam *Kependudukan*, Vol 4 No 2, Juli 2002, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung.
- , 2003a. Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 2003b. Padigma Baru: Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, TH. VIII/01/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- , 2003c. Analisis Usahatani Hortikultura Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Daerah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, dalam *Perspektif*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2003, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Bungaran Saragih, 2001a, *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*, Yayasan USESE, Bogor.
- , 2001b, *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, Yayasan USESE, Bogor.
- Bustanul Arifin, 2001, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

